

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang bisa digunakan oleh pihak eksternal dalam menilai kinerja perusahaan. Laporan keuangan adalah ringkasan dari suatu proses pencatatan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku bersangkutan. Tujuan manajemen membuat laporan keuangan adalah untuk mempertanggungjawabkan tugas-tugas yang diberikan kepadanya oleh para pemilik perusahaan.

Menurut *Statement of Financial Accounting Concept* (SFAC) No 1, informasi laba merupakan perhatian utama untuk menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen. Laba yang terkandung dalam laporan laba rugi dapat mencerminkan kinerja manajemen suatu perusahaan. Selain itu, informasi laba juga membantu pemilik atau pihak lain dalam menaksir *earnings power* perusahaan yang akan datang.

Informasi laba sering menjadi target rekayasa tindakan oportunistis manajemen untuk memaksimumkan kepuasaannya, tetapi dapat merugikan pemegang saham atau investor. Tindakan oportunistis tersebut dilakukan dengan cara memilih kebijakan akuntansi tertentu, sehingga laba perusahaan dapat diatur, dinaikkan maupun diturunkan sesuai dengan keinginannya. Perilaku manajemen untuk mengatur laba sesuai dengan keinginannya ini dikenal dengan istilah manajemen laba (*earnings management*).

Manajemen laba adalah campur tangan manajemen dalam proses pelaporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri (manajer). Manajemen laba dilakukan oleh manajer atau para pembuat laporan keuangan dalam proses pelaporan keuangan suatu organisasi karena mereka mengharapkan suatu manfaat dari tindakan yang dilakukannya (Gumanti, 2000 dalam Indriani, 2010).

Fenomena tindakan manajemen laba telah terjadi di berbagai perusahaan, termasuk dunia perbankan. Pada Industri perbankan terdapat regulasi yang lebih ketat dibandingkan dengan industri lain. Bank Indonesia (selanjutnya disingkat BI) menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dalam penentuan status suatu bank (apakah bank tersebut merupakan bank yang sehat atau tidak). Oleh karena itu, manajer mempunyai inisiatif untuk melakukan manajemen laba supaya perusahaan mereka dapat memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh BI. Hasil penelitian Setiawati dan Na'im (2001), Rahmawati dan Baridwan (2006) dalam Purwandari (2011) menunjukkan bahwa perbankan di Indonesia melakukan manajemen laba untuk memenuhi kriteria BI tersebut.

Adapun beberapa kasus skandal tindakan manajemen laba yang telah dilakukan oleh beberapa perusahaan maupun perbankan yang sudah tidak menjadi rahasia umum lagi, yang diantaranya adalah kasus PT. Kimia Farma Tbk dan PT. Bank Lippo Tbk. Hal itu berawal dari terdeteksi adanya manipulasi yang dilakukan oleh kedua perusahaan tersebut (Boediono, 2005).

Pada tahun 2001 PT. Kimia Farma Tbk melakukan mark up laba bersih dalam laporan keuangannya. Kejadian yang sama terjadi pada tahun 2002 PT. Bank Lippo Tbk juga melakukan manipulasi terhadap laba bersih dalam laporan keuangannya, hal itu dapat terungkap karena diketahuinya manipulasi pada pelaporan keuangan yang telah dinyatakan “Wajar Tanpa Syarat”. PT. Bank Lippo Tbk menyebutkan total aktiva perseroan yang berbeda dalam pelaporannya, pada tanggal 28 November 2002 disebutkan total aktiva perseroan adalah sebesar Rp.24 triliun dan laba bersih sebesar Rp.98 miliar, sedangkan pada tanggal 27 Desember 2002 disebutkan total aktiva berkurang menjadi Rp 22,8 triliun dan mengalami rugi bersih sebesar Rp 1,3 triliun. Hal itu mengakibatkan, dalam keseluruhan neraca terjadi penurunan rasio kecukupan modal (CAR) dari 24,77 persen menjadi 4,23 persen. Akhirnya BAPEPAM memberi sanksi berupa denda dan pencopotan direksi dan pihak terkait yang terlibat dalam kasus tersebut, (Sumber:Tempointeraktif.com). Hal tersebut membuktikan bahwa praktik manipulasi laporan keuangan tetap dilakukan oleh pihak korporat meskipun sudah menjauhi periode krisis tahun 1997-1998.

Isu yang menarik adalah apakah praktik manajemen laba juga terjadi di bank umum syariah. Praktik manajemen laba seharusnya lebih rendah di bank umum syariah, karena bank umum Syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang memantau kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh bank umum Syariah. Selain itu, aturan praktik di bank umum Syariah berasal dari Al-quran dan As-Sunnah yang apabila perbankan Syariah benar-benar menerapkan aturan itu maka seharusnya tidak terdapat praktik manajemen laba di

bank syariah. Berbeda halnya dengan bank konvensional yang tidak memiliki DPS ataupun DSN. Berdasarkan alasan tersebut, sebelum peneliti melakukan penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* dan profitabilitas terhadap manajemen laba di perbankan, terlebih dahulu peneliti tertarik meneliti tentang perbedaan antara praktik manajemen laba di bank umum Syariah dan bank umum Konvensional.

Tindakan manajemen laba tersebut dapat diminimumkan melalui suatu mekanisme monitoring yang bertujuan untuk menyelaraskan (*alignment*) berbagai kepentingan yang disebut *corporate governance*. *Corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Berdasarkan pengertian tersebut maka untuk menjalankan aktivitasnya perbankan harus mempunyai integritas tinggi supaya masyarakat memiliki kepercayaan dalam rangka menjalin hubungan kerja sehingga akan memperkecil kemungkinan perusahaan mengalami *collapse* (bangkrut).

Untuk mencegah tindakan manajemen laba di perbankan, Bank Indonesia selaku regulator lembaga perbankan mengeluarkan banyak peraturan yang terkait langsung dengan upaya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Pada

tahun 2004 dikeluarkanlah Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang mempunyai visi untuk menciptakan suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada tahun 2008 pemerintah juga membentuk Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/4/DPNP tanggal 27 Januari tahun 2009 perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia. Dengan PAPI diharapkan dapat terjadi peningkatan transparansi kondisi keuangan bank sehingga laporan keuangan bank menjadi semakin relevan, komprehensif, handal, dan dapat diperbandingkan.

Bank Indonesia sebagai badan yang mengawasi semua bank yang ada di Indonesia tahun 2006 mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum. Dalam peraturan tersebut tercantum hal mengenai keanggotaan komisaris independen dan komite audit yang bertugas mengawasi kinerja bank berdasarkan informasi-informasi dalam laporan keuangan.

Mekanisme *corporate governance* terdiri dari beberapa indikator yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen, kepemilikan manajerial, kualitas audit, kompensasi bonus, bukti audit, komite audit, ukuran dewan direksi, dan lain-lain. Namun pada penelitian ini indikator yang digunakan adalah kepemilikan institusional dan proporsi komisaris independen, karena pada hasil-hasil penelitian sebelumnya kedua indikator ini belum memiliki konsistensi hasil, selain itu peneliti

menganggap bahwa penggunaan kedua indikator ini sudah dapat mewakili indikator-indikator yang lainnya.

Menurut Junaidi (2007) dalam Sefiana (2008), keberadaan investor institusional dipandang mampu menjadi alat monitoring efektif bagi perusahaan karena dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan tersebut. Para investor institusional mempunyai kesempatan, sumber daya dan kemampuan untuk melakukan pengawasan, menertibkan dan mempengaruhi para manajer perusahaan dalam hal tindakan oportunistik manajemen (Nuraini dan Zain, 2007), seperti tindakan manajemen laba. Manajer menyadari bahwa investor institusional tidak mudah diperdaya dan dapat melakukan analisa yang lebih baik dibandingkan investor lain sehingga manajer akan menghindari manajemen laba. Beberapa peneliti menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba dan signifikan (Nuraini dan Zain, 2007; Purwandari, 2011; Simamora, 2011). Dan ada juga beberapa peneliti yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap manajemen laba (Junaidi, 2007; Iqbal, 2007; Astuti, 2010 dalam Sefiana, 2008).

Kemampuan monitoring dari komisaris independen sangat diperlukan untuk mengawasi direksi dalam menjalankan perusahaan. Jika monitoring dari dewan direksi cenderung lemah, maka ada kecenderungan terjadinya tindakan yang tidak baik yang dilakukan oleh para direktur perusahaan untuk kepentingannya melalui pemilihan perkiraan-perkiraan akrual yang berdampak pada manajemen laba. Oleh

karena itu sangat diperlukan komisaris independen dalam dewan komisaris yang ada di perusahaan. Berdasarkan keputusan Direksi BEI nomor: KEP-399/BEJ/07-2001 yaitu Pencatatan Efek Nomor I-A, komisaris independen bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan. Pada penelitian Herni dan Susanto (2008), menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Namun, ada juga beberapa peneliti yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba (Ujitantho dan Pramuka, 2007; Junaidi, 2007 dalam Sefiana, 2008). Serta ada juga beberapa peneliti yang menyatakan bahwa proporsi komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba (Purwandari, 2011; Simamora, 2011; Siregar dan Utama, 2006).

Perusahaan dapat melihat kinerja perusahaan melalui tingkat perolehan laba karena laba merupakan indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan. Kinerja perusahaan ini dapat dilihat melalui profitabilitas. Menurut Kartini dan Arianto (2007) dalam Isnanta (2008), Profitabilitas (*profitability*) adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Pihak *Principal* cenderung menuntut manajemen untuk mencapai profitabilitas yang tinggi. Apabila manajemen mampu mencapai target dari *Principal*, manajemen akan dianggap mempunyai kinerja yang baik. Berdasarkan alasan tersebut apabila ada perusahaan yang memiliki profitabilitas yang rendah maka perusahaan tersebut cenderung akan melakukan praktik manajemen laba. Menurut Rahmawati (2008),

profitabilitas akan mempengaruhi manajer dalam melakukan tindakan manajemen laba. Dalam penelitian Nasser dan Parulian (2006) dalam Herni dan Susanto (2008), menyimpulkan bahwa variabel profitabilitas atau laba berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian lain dilakukan oleh Rahmawati (2008) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Namun ada juga beberapa peneliti yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba (Herni dan Susanto, 2008; Purwandari, 2011), Pengaruh ini menunjukkan semakin tinggi profitabilitas maka akan semakin rendah perusahaan melakukan tindakan perataan laba yang bersifat oportunistik.

Berdasarkan penelitian terdahulu atas kedua indikator *corporate governance* dan satu variabel independen lain yaitu profitabilitas, maka dapat disimpulkan terdapat ketidakkonsistenan hasil. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menguji kembali pengaruh kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, profitabilitas terhadap manajemen laba dengan sampel perbankan yaitu bank umum Syariah dan bank umum konvensional. Periode yang digunakan dalam penelitian ini berkisar antara tahun 2009 sampai tahun 2011 yang dianggap sudah cukup dan relevan oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan judul yang sesuai untuk penelitian ini adalah “PENGARUH MEKANISME *CORPORATE GOVERNANCE* DAN PROFITABILITAS TERHADAP MANAJEMEN LABA DI PERBANKAN YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA”.

B. Batasan Masalah

Ada banyak indikator *corporate governance* yang dapat mempengaruhi praktik manajemen laba di perbankan, namun dalam penelitian ini peneliti hanya menggunakan dua indikator saja yaitu kepemilikan institusional dan proporsi komisaris independen.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat perbedaan praktik manajemen laba di bank umum syariah dan bank umum konvensional?
2. Apakah terdapat pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik manajemen laba?
3. Apakah terdapat pengaruh proporsi komisaris independen terhadap praktik manajemen laba?
4. Apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap praktik manajemen laba?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan praktik manajemen laba di bank umum syariah dan bank umum konvensional.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap praktik manajemen laba.

3. Untuk mengetahui pengaruh proporsi komisaris independen terhadap praktik manajemen laba.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap praktik manajemen laba.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut:

1. Bidang teoritis.
 - a. penelitian ini memberikan informasi mengenai ketepatan dan keefektifan mekanisme *good corporate governance* dunia perbankan di Indonesia.
 - b. Sebagai salah satu acuan yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian di masa yang akan datang, khususnya penelitian-penelitian akuntansi berbasis keuangan dan pasar modal.
2. Bidang praktisi.
 - a. Memberikan wacana alternatif bagi para pemakai laporan keuangan dan praktisi penyelenggara perusahaan perbankan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi praktek manajemen laba dan mekanisme *corporate governance* serta profitabilitas.
 - c. Bagi perusahaan perbankan, hasil penelitian ini juga bermanfaat kepada para pemegang saham dari perusahaan perbankan yang ingin mewujudkan *corporate governance*.

- d. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada investor untuk menilai kinerja perusahaan perbankan sebelum melakukan investasi pada suatu perusahaan perbankan.
- e. Bagi kreditur, penelitian ini diharapkan memberikan informasi kepada kreditur tentang kinerja perusahaan perbankan yang melakukan kontrak utang dengan kreditur, sehingga perusahaan yang menjadi pihak kreditur tidak akan mengalami kerugian nantinya akibat perusahaan perbankan yang memiliki utang terhadap kreditur mengalami kebangkrutan.
- f. Bagi manajemen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada manajemen untuk menghindari tindakan manajemen laba yang dapat merugikan pribadi dan perusahaan perbankan di mata publik dan dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap perusahaan perbankan.
- g. Bagi BAPEPAM, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada BAPEPAM dalam menambah peraturan seputar manajemen laba dan *corporate governance* dalam perusahaan perbankan.